

BAB III
DESKRIPSI KPRI BINA WARGA SYARIAH
KANTOR DINDIKBUD KABUPATEN SERANG

A. Sejarah Koperasi

Sejarah koperasi Indonesia dimulai pada abad ke-20, dan pada saat yang sama, pada abad itu, kemiskinan mulai muncul di Indonesia yang disebabkan oleh kapitalisme di mana-mana. Beberapa orang dengan kehidupan sederhana dan sarana keuangan terbatas dipaksa untuk bekerja sama dan bersatu untuk diri mereka sendiri dan sesama manusia. Akhirnya pada tahun 1985 di Leuwilang Patih R. Aria Waria Atmaja pertama kali mendirikan koperasi di Purwokerto untuk mendirikan bank bagi pegawai negeri pribumi, untuk membantu pegawai yang semakin terjebak oleh rentenir yang menawarkan pinjaman berbunga tinggi, maka terbentuklah koperasi kredit guna mengatasi masalah tersebut.

Kemudian pada 12 Juli 1951, Hatta membacakan pidato di stasiun radio khusus menyambut Hari Kerja Sama Indonesia. Dengan peran pentingnya dalam dunia koperasi. Pada tanggal 17 Juli 1953, melalui Kongres Koperasi Indonesia di Bandung, Muhammad Hatta resmi menjadi bapak koperasi Indonesia. Disela-sela kesibukannya mengabdikan kepada negara, Pak Hatta juga aktif membimbing gerakan

koperasi untuk mengimplementasikan cita-cita filosofi ekonominya. Pandangannya tentang koperasi dituangkan dalam bukunya *Membangun Koperasi dan Koperasi Membangun* (1971).¹

B. Profil Koperasi Bina Warga Syariah

Koperasi Bina Warga Syariah merupakan koperasi pegawai yang terdapat di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang, berada di jalan Panancangan Baru No. 140 Serang.

Koperasi ini dibentuk pada 27 Maret 1987, dan sudah memiliki badan hukum (Nomor : 062.A/BH/PAD/XI.2/BID.KOP/VI/2008) Tanggal 2 Juni 2008. Untuk saat ini sudah memiliki beberapa anggota yang berasal dari masyarakat Serang yang tergabung sebagai anggota koperasi.

C. Visi dan Misi Koperasi Bina Warga Syariah

Visi : Dari anggota oleh anggota untuk anggota menuju terwujudnya koperasi syariah yang amanah.

Misi :

- 1) Meningkatkan mutu manajemen dan tata kelola koperasi
- 2) Mengoptimalkan sumber daya yang ada untuk meningkatkan pelayanan dan usaha koperasi

¹ Agung, Ahmad, S.Ag, *Ekonomi Koperasi & UMKM*,... h. 7-8.

- 3) Meningkatkan partisipasi aktif anggota sebagai pemilik koperasi
- 4) Meningkatkan pelayanan pembiayaan kepada anggota dengan akad syariah
- 5) Melakukan kerjasama usaha yang saling menguntungkan dalam rangka pengembangan koperasi.

D. Struktur Organisasi Koperasi Bina Warga Syariah

1. Pengertian Struktur Organisasi

Organisasi adalah alat untuk mencapai tujuan berdasarkan kerjasama, berupa koordinasi yang jelas sesuai dengan tugasnya masing-masing dalam setiap bidangnya. Struktur organisasi merupakan suatu susunan kedudukan yang mapan dan sebagai salah satu faktor untuk mempengaruhi orang-orang yang berada di dalamnya. Semua pemimpin dan bawahan dalam organisasi menyadari dengan jelas ruang lingkup kegiatan yang dilakukan, batasan atau wewenang yang ada padanya, dan dia harus bertanggung jawab dengan hal yang dilakukannya.

Keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan perlu memerlukan banyak bantuan, baik individu tersebut menjadi anggota organisasi atau tidak. Oleh karena itu, struktur organisasi merupakan alat yang digunakan untuk mencapai tujuan. Sebuah

perusahaan yang bekerja karena tujuan perusahaan dapat dicapai dengan kerjasama dan koordinasi yang baik dari para anggotanya. Hal ini dicapai dengan pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing anggota organisasi secara jelas.²

2. Struktur Organisasi (Susunan Kepengurus KPRI Bina Warga Syariah)

Tabel 3.1
Data Kepengurusan KPRI Bina Warga Syariah

No.	Nama	Keterangan
KEPENGURUSAN INTI		
1.	KETUA	Drs. H. DARWINUR
2.	WAKIL KETUA	MARSILAH, SE
3.	SEKRETARIS	NURDIN, S.Ip
4.	WAKIL SEKRETARIS	ENDIANA RAHMAN, ST
5.	BENDAHARA	MUSYAFAK
BADAN PENGAWAS		
1.	KETUA	M. SUMARDI, S.E
2.	ANGGOTA	Drs. IWAN SETIAWAN, M.Pd.
3.	ANGGOTA	Drs. JUMALIAH
BADAN PENGAWAS SYARIAH		
1.	KETUA	Ir. H. SYAMSYUDIN
2.	ANGGOTA	Dr. (C) RUSTAMUNADI, SH. MH
3.	ANGGOTA	Dr. MULYADI, M.M

² Dian, Nurul Ayu Pratiwi, *Prosedur Pembukaan Dan Penutupan Produk Simpanan Di Koperasi Pegawai Republik Indonesia Sejahtera Kecamatan Karang Pilang Kota Surabaya*, Artikel Ilmiah STIE PERBANAS Surabaya.

3. Jumlah Anggota Koperasi pada tahun 2020, sebagai berikut:

Tabel 3.2

Data Anggota KPRI Bina Warga Syariah

No	Keterangan	Jumlah
1.	Anggota Tahun Buku 2019	229 Orang
2.	Anggota Keluar Tahun Buku 2020	20 Orang
3.	Anggota Masuk Tahun Buku 2020	3 Orang
4.	Jumlah Anggota Akhir Tahun Buku 2020	212 Orang

E. Deskripsi Tugas Organisasi

1. Pengurus

Adalah pihak yang bertanggung jawab mengurus koperasi. Wewenang pengurus ialah mewakili di dalam maupun luar pengadilan dan meningkatkan peran koperasi tersebut. Adapun tugasnya sebagai berikut:

- a. Mengelola koperasi
- b. Mengajukan rancangan Rencana kerja, budget, dan belanja koperasi
- c. Menyelenggarakan Rapat Anggota
- d. Mengajukan laporan keuangan dan pertanggung jawaban
- e. Maintenance daftar anggota dan pengurus

2. Pengelola

Adalah pihak yang mengelola berjalannya koperasi, tugasnya sebagai berikut:

- a. Karyawan/pegawai yang diberikan kuasa dan wewenang oleh pengurus
- b. Untuk mengembangkan usaha dengan efisien dan profesional
- c. Hubungannya dengan pengurus bersifat kontrak kerja
- d. Diangkat dan diberhentikan oleh pengurus

3. Pengawas

Adalah perangkat organisasi yang dipilih dari anggota dan diberi mandat untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya organisasi dan usaha koperasi.

4. Anggota

Adalah orang-orang atau badan hukum koperasi yang mempunyai kepentingan ekonomi yang sama sebagai pemilik dan sekaligus pengguna jasa, berpartisipasi aktif untuk mengembangkan usaha koperasi serta terdaftar dalam buku daftar anggota. Status anggota koperasi sebagai badan usaha yaitu sebagai pemilik dan sebagai pemakai.³

³ Agung, Ahmad, S.Ag, *Ekonomi Koperasi & UMKM...* h. 18-19.

F. Produk Koperasi Bina Warga Syariah

1. Produk Simpanan yang terdiri dari Simpanan Pokok sebesar Rp. 50.000 dibayarkan sekali pada saat pendaftaran menjadi anggota koperasi, Simpanan Wajib sebesar Rp. 150.000 per bulan, dan Simpanan Sukarela dilakukan setiap saat serta tidak ada batasan nominal.
2. Produk Tabungan Hari Raya Idul Fitri sebesar Rp. 200.000 per bulan.
3. Produk Pembiayaan yaitu transaksi syariah yang dilakukan oleh anggota koperasi dengan Akad Murabahah dan Akad Ijarah.
4. Produk Santunan yaitu pemberian santunan kepada keluarga anggota yang meninggal sebesar Rp. 500.000,- dan anggota yang pensiun Rp. 250.000,-.

G. Akad Pembiayaan Koperasi Bina Warga Syariah

1. Akad Ijarah (Sewa-Menyewa)

Yaitu menurut Syayid Sabiq dalam Fiqh Sunnah al-ijarah berasal dari kata al-ajru yang berarti al-‘Iwadhu (ganti/kompensasi). Ijarah dapat didefinisikan sebagai akad pemindahan hak guna atas suatu barang atau jasa, dalam waktu tertentu dengan pembayaran

upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.⁴

Kemudian dalam akad ijarah pada KPRI Bina Warga Syariah berupa penyewaan 4 unit kios kepada anggota koperasi yang ingin digunakan untuk keperluan usaha anggota dan sebagian inventaris (aset bergerak) pada koperasi, akan tetapi sedang dalam perbaikan dikarenakan kondisi rusak karena usia.

2. Akad Murabahah (Keuntungan)

Yaitu secara bahasa murabahah adalah mengambil keuntungan yang disepakati. Bai' murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam bai' murabahah penjual harus memberitahu harga produk yang dia beli dan menentukan keuntungan sebagai tambahannya.⁵

Kemudian dalam akad murabahah pada KPRI Bina Warga Syariah berupa bantuan dana pendidikan, kesehatan, renovasi rumah, dan terdapat pinjaman khusus yakni untuk beribadah umroh anggota koperasi.

⁴ Sri Nurhayati-Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2009), cet. ke 1, h. 216.

⁵ Harisman, *Kamus Istilah Keuangan dan Perbankan Syari'ah*, (Jakarta : Direktorat Perbankan Syari'ah, 2006), h. 48.

